



**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
(PERUBAHAN RENJA)**

**BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2019**

**Payakumbuh, Agustus 2019**



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 65 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran Perubahan RKPD Kota Payakumbuh;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang Perubahan RKPD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 701);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032 )Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1).
25. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 42 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 42);
26. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 56 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 57).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG  
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh;
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan;

8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Kota Payakumbuh adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun;
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota;
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
17. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis,

dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan;

18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
19. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*);
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud;
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program;
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh

- dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program;
27. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

## **BAB II**

### **PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 2**

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 merupakan Perubahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun sebagai penjabaran Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019;

#### **Pasal 3**

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
  5. Dinas Sosial;
  6. Kantor Kesbangpol;
  7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemandan Kebakaran;
  8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

9. Dinas Perhubungan;
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Ketahanan Pangan;
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah
24. Inspektorat;
25. Sekretariat Daerah;
26. Sekretariat DPRD;
27. Kecamatan Payakumbuh Utara;
28. Kecamatan Payakumbuh Barat;
29. Kecamatan Payakumbuh Timur;
30. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
31. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

#### **Pasal 4**

Perubahan Renja Perangkat Daerah harus memuat evaluasi Renja Tahun sebelumnya sampai triwulan II tahun berjalan, perubahan terhadap program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif

### **Pasal 5**

Sistematika dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sekurang – kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
- c. perubahan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
- d. penutup

### **Pasal 6**

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
- b. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
- c. RTRW Kota Payakumbuh;
- d. Hasil Evaluasi tahun n-1 dan evaluasi sampai triwulan II tahun berjalan.

### **Pasal 7**

Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 bertujuan untuk :

- a. Menyesuaikan perencanaan teknis Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun berjalan;
- b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;

**BAB III**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi perubahan perencanaan kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 19 Agustus 2019

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**



**RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 19 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,**



**RIDA ANANDA**

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	I-1
1.1 Latar Belakang Perubahan .....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan .....	I-2
1.3 Dasar Hukum Perubahan .....	I-2
1.4 Sistematika Perubahan .....	I-4
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II</b> .....	II-1
<b>BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2018</b> .....	III-1
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	IV-1

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Renja Bappeda Tahun 2019 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019 Kota Payakumbuh .....	II - 2
Tabel 3.1	Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Pendanaan Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2019 .....	III - 5

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2019 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2019. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Bappeda Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2019 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Bappeda Tahun 2019. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2019, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2019 disusun berdasarkan hasil pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2019, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Bappeda Kota Payakumbuh yaitu "Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terintegrasi,

Inovatif Dan Berkelanjutan" dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kota Payakumbuh dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan dokumen Renja Bappeda 2019 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2019.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan**

### **Maksud**

Maksud penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2019 adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi Bappeda Kota Payakumbuh dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2019 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2019.

### **Tujuan**

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2019 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan Bappeda sampai dengan triwulan dua tahun 2019.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019 dengan dokumen Perubahan Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2019.

## **1.3 Dasar Hukum Perubahan**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2019 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 25);

13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 26);
15. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019.

## **1.4 Sistematika Perubahan**

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang Perubahan RKPD
- 1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan
- 1.3 Dasar Hukum Perubahan RKPD
- 1.4 Sistematika Perubahan RKPD

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Bappeda Tahun 2019

BAB IV Penutup

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Tahun 2019, Bappeda Kota Payakumbuh sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan melaksanakan 2 (dua) urusan penunjang yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan.

Dalam pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Urusan Perencanaan, Bappeda Kota Payakumbuh melaksanakan 14 program dengan 43 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.138.959.208,- dengan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan II sebesar Rp. 1.165.161.837,- atau 37,12%, masih rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan II disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi anggarannya karena dianggarkan di triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat) tetapi secara fisik telah mulai dilaksanakan.

Kegiatan yang belum direalisasikan keuangannya yaitu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Koordinasi Penyusunan Aksi SDG'S dan kegiatan yang anggaran kasnya triwulan III yaitu Perubahan RKPD. Kegiatan yang telah terealisasi tetapi masih rendah antar lain : Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas (5.51%), Penyusunan Informasi Pembangunan Daerah (4.77%), Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) (1.09%), Intensifikasi SAKIP (2.23%), Kegiatan Review RPIJM (5.62%) dan Koordinasi Perencanaan Air Minum , Drainase Dan Sanitasi Air Perkotaan (6.30%).

Urusan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan Bappeda tahun 2019 dengan jumlah anggaran Rp. 481.338.853,- dengan 1 program dan 4 kegiatan. Realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2019 masih rendah yaitu sebesar Rp. 19.011.800,- atau sebesar 3.95%. dengan rincian yaitu Kajian ekonomi pembangunan daerah dan kewilayahan (1.51%), Kajian sosial dan pemerintahan (1.22%) Penguatan inovasi pemerintahan layanan publik (5.01%) dan Pengembangan karya inovasi dan teknologi tepat guna (21.03%).

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada triwulan III sehingga realisasi program/kegiatan sampai kondisi Juni 2019 masih rendah tetapi secara fisik telah dalam proses pelaksanaan.

**TABEL 2.1**  
**EVALUASI HASIL RENJA BAPPEDA TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 KOTA PAYAKUMBUH**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2018		Target Kinerja Renja Tahun 2019		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Triwulan II Tahun 2019	
									Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	10 = (8/6)	11 = (9/7)
4.	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			22,909,468,481		4,747,838,175		3,620,298,061		1,184,173,637		32.71		
4.01	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>			20,035,231,628	-	4,747,838,175		3,138,959,208		1,165,161,837		37.12		
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Nilai IKM</b>	<b>89.00</b>	<b>6,570,444,054</b>	<b>80.00</b>	<b>1,675,771,875</b>	<b>81.00</b>	<b>1,465,057,272</b>	<b>81.22</b>	<b>631,011,947</b>	<b>101.53</b>	<b>43.07</b>	<b>81.22</b>	<b>91.26%</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	benda pos 1600 lembar, cek giro 60 buku, paket pengiriman 90 kg	15,852,067	Benda pos 300 lembar, cek giro 10 buku, paket pengiriman 15 Kg	4,559,100	Benda pos 300 lembar, cek giro 10 buku, paket pengiriman 15 Kg	2,387,000	Benda pos 150 lembar, cek giro 5 buku, paket pengiriman 7 Kg	892,500	50.00	37.39	Benda pos 450 lembar, cek giro 15 buku, paket pengiriman 22 Kg	28.13
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik, telpon yang dibayarkan	24 rekening, 72 bulan	720,037,163	4 rekening, 12 bulan	121,261,381	4 rekening, 12 bulan	99,999,996	4 rekening, 12 bulan	31,166,383	50.00	31.17	8 rekening, 24 bulan	33.33
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	142 unit	35,695,375	24 unit	10,930,200	24 unit	5,375,000	3 unit	296,250	12.50	5.51	27 unit	19.01
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	84 orang	2,462,310,011	14 orang	448,755,120	14 orang	462,571,000	14 orang	176,616,000	100.00	38.18	28 orang	33.33
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli, jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayar	102 jenis, 12 orang	384,699,143	17 jenis, 2 orang	114,968,721	17 jenis, 2 orang	58,608,336	17 jenis, 2 orang	25,218,763	100.00	43.03	34 jenis, 4 orang	33.33
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	336 unit	119,611,051	56 unit	33,846,000	56 unit	18,011,000	15 unit	3,475,000	26.79	19.29	68 unit	20.24
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	354 unit	186,545,187	59 jenis	44,980,000	59 jenis	30,360,896	30 jenis	9,249,000	50.85	30.46	89 jenis	25.14
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	48 jenis, 300.000 lembar, 1200 buku	127,000,913	8 jenis, 50.000 lembar, 200 buku	38,770,615	8 jenis, 50.000 lembar, 200 buku	19,807,872	4 jenis, 25.000 lembar, 100 buku	9,445,800	50.00	47.69	12 jenis, 75.000 lembar, 300 buku	25.00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	12 jenis	47,179,600	2 jenis	20,415,400	2 jenis	5,600,000	2 jenis	1,560,000	100.00	27.86	4 jenis	33.33
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	21.600 eksemplar; 288 buku	140,257,920	3.600 eksemplar; 48 buku	41,865,000	3.600 eksemplar; 48 buku	21,120,000	1.800 eksemplar; 24 buku	8,704,000	50.00	41.21	5.400 eksemplar; 72 buku	25.00
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan; dan minuman/snack yang disediakan	3.444 porsi; 5.802 porsi; 378 galon	105,793,130	574 porsi, 967 porsi, 63 galon	31,444,240	574 porsi, 967 porsi, 63 galon	15,931,000	280 porsi, 480 porsi, 30 galon	4,252,920	48.78	26.70	854 porsi, 1447 porsi, 93 galon	24.80
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	240 kali; 150 kali	2,053,813,034	40 kali, 25 kali	712,714,583	40 kali, 25 kali	698,956,200	20 kali, 12 kali	348,283,996	50.00	49.83	60 kali, 27 kali	25.00
	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga adm/teknik perkantoran yang dibayarkan	10 orang	171,649,459	1 orang	51,261,515	1 orang	26,328,972	1 orang	11,851,335	100.00	45.01	2 orang	20.00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2018		Target Kinerja Renja Tahun 2019		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Triwulan II Tahun 2019					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)				
									K	Rp.	K	Rp.			10 = (8/6)	11 = (9/7)		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (8/6)	11 = (9/7)	12	13 = (12/4)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80,00%	1,038,276,436	80,00%	236,657,352	80,00%	158,818,340	80,00%	51,161,381	100.00	32.21	80,00%	100.00				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	21 unit kendaraan roda dua; 4 unit kendaraan roda empat	1,038,276,436	21 kendaraan roda dua; 4 unit kendaraan roda empat	236,657,352	21 kendaraan roda dua; 4 unit kendaraan roda empat	158,818,340	10 kendaraan roda dua; 2 unit kendaraan roda empat	51,161,381	47.62	32.21	10 kendaraan roda dua; 2 unit kendaraan roda empat	47.62				
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100%	122,400,000	100%	36,891,800	100%	18,900,000	100%	17,996,000	100.00	95.22	100%	100.00				
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	272 stel	122,400,000	42 stel	36,891,800	42 stel	18,900,000	40 stel	17,996,000	95.24	95.22	82 stel	30.15				
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	18 orang	257,886,373	3 orang	26,079,938	3 orang	26,840,724	-	-	-	-	3 orang	16.67				
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang dikirim untuk mengikuti bimbingan teknis	18 orang	257,886,373	3 orang	26,079,938	3 orang	26,840,724	-	-	-	-	3 orang	16.67				
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		A	161,703,750	BB	34,480,120	A	13,500,000	A	9,446,160	100.00	69.97	A	100.00				
	Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan SKPD yang disusun	36 laporan	79,781,500	-	18,980,120	6 Laporan	6,820,000	4 Laporan	5,723,000	66.67	83.91	4 Laporan	11.11				
	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan publik	Indeks kepuasan konsumen	24 laporan	81,922,250	-	15,500,000	4 Dokumen	6,680,000	2 Dokumen	3,723,160	50.00	55.74	2 Dokumen	8.33				
6	Program Pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data /informasi perencanaan pembangunan daerah	95.00%	1,312,674,780	80,00%	249,626,381	80,00%	144,812,010	-	7,227,000	-	4.99	80,00%	80.00				
	Penyusunan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang disusun	12 dokumen	631,488,606	2 dokumen	174,181,881	1 dokumen	53,521,700	-	2,555,000	-	4.77	2 Dokumen	16.67				
	Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)	Jumlah dokumen indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Payakumbuh	5 dokumen	506,778,044	1 dokumen	75,444,500	1 dokumen	75,394,450	-	822,000	-	1.09	1 dokumen	20.00				
	Koordinasi, rekapitulasi dan konsolidasi data teknis dan rencana kegiatan usulan DAK	Usulan Bidang DAK yang diusulkan	10 bidang	174,408,130			10 bidang	15,895,860	12 bidang	3,850,000	120.00	24.22	12 bidang	120.00				
7	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti	90%	475,165,066	90%	150,792,611	90%	19,128,000	-	4,187,200	-	21.89	90,00%	50.00				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2018		Target Kinerja Renja Tahun 2019		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Triwulan II Tahun 2019	
									Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	10 = (8/6)	11 = (9/7)
1	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	- Jumlah rapat koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah yang dilaksanakan - Jumlah MOU yang dibuat	- 4 kali; - 3 MOU	475,165,066	- 6 kali; - 3 MOU	150,792,611	- 6 kali; - 3 MOU	19,128,000	2 kali	4,187,200	33.33	21.89	2 kali	50.00
7	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh</b>	<b>Persentase PD bidang IPW yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras</b>	<b>100%</b>	<b>470,405,421</b>	<b>100%</b>	<b>75,917,767</b>	<b>100%</b>	<b>11,762,725</b>	-	<b>2,110,350</b>	-	<b>17.94</b>	<b>100%</b>	<b>17.92</b>
	Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh tingkat kota, propinsi dan pusat	30 kali	229,704,312	5 kali	75,917,767	4 kali	6,202,475	2 kali	1,079,250	50.00	17.40	7 kali	23.33
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Jumlah rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah Tingkat Kota, propinsi dan pusat	32 SKPD, 16 kali, 20 kali, 8 kali, 100%	240,701,109			8 kali	5,560,250	4 kali	1,031,100	50.00	18.54	4 kali	12.50
8	<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar</b>	<b>Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>875,935,981</b>	<b>100%</b>	<b>130,780,980</b>	<b>100%</b>	<b>40,772,125</b>	-	<b>3,259,100</b>	-	<b>7.99</b>	<b>100%</b>	<b>11.78</b>
	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah rapat-rapat koordinasi pengentasan masalah air minum dan sanitasi tingkat kota, propinsi dan pusat	72 SKPD, 30 kali, 6 kali, 100%	347,696,857	5 kali	106,710,880	5 kali	15,438,875	2 kali	972,000	40.00	6.30	7 kali	9.72
	Koordinasi Penataan dan Pencegahan Kawasan Kumuh	Jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi Penataan, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh tingkat kota, propinsi dan pusat	65 skpd, 30 kali, 5 kali, 100%	169,453,856	6 kali	24,070,100	6 kali	5,671,500	3 kali	1,181,800	50.00	20.84	9 kali	13.85
	Revisi RPIJM	Jumlah dokumen RPIJM yang direvisi	4 dokumen	358,785,268	-	-	1 dokumen	19,661,750	-	1,105,300	-	5.62	-	-
9	<b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Persentase faskel yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik</b>	<b>100%</b>	-	<b>82,99%</b>	<b>155,570,350</b>	<b>85.11%</b>	<b>78,377,010</b>	-	<b>40,056,400</b>	-	<b>51.11</b>	<b>82.99%</b>	<b>1660.78%</b>
	Peningkatan kapasitas tenaga fasilitator perencana	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	283 orang	537,525,903	47 orang	155,570,350	47 orang	78,377,010	-	40,056,400	-	51.11	47 orang	16.61

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2018		Target Kinerja Renja Tahun 2019		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Triwulan II Tahun 2019	
									Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	10 = (8/6)	11 = (9/7)
10	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Usulan masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah	70.00%	6,888,314,992	50.00%	1,702,387,820	55.00%	1,084,043,952	-	369,451,549	-	34.08%	50.00%	33.89
		Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD			95.21%		95.24%							
		Persentase Peringkat Daerah yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90 %			100.00%		100.00%							
	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah draf dokumen rancangan awal RKPD yang disusun	6 dokumen	1,174,710,657	1 dok	331,021,500	1 dokumen	254,837,000	1 dokumen	252,477,100	100.00	99.07	2 dokumen	33.33
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Forum SKPD dan Musrenbang RKPD	15 hari	1,149,124,649	2 hari	268,612,325	2 hari	135,143,615	2 hari	66,484,125	100.00	49.20	4 hari	26.67
	Penetapan RKPD	Jumlah perwako RKPD yang diterbitkan	6 perwako	264,450,607	1 Perwako	77,399,555	1 Perwako	29,202,320	1 Perwako	4,288,160	100.00	14.68	2 Perwako	33.33
	Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen evaluasi, pengendalian, pelaporan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	18 dokumen	288,203,488	2 dok	115,339,438	2 dok	10,552,400	1 dok	1,151,000	50.00	10.91	2 dok	11.11
	Keberlanjutan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang diproses melalui SIPPD	12 dokumen	1,919,307,669	2 dokumen	574,983,717	2 dokumen	210,322,650	1 dokumen	36,787,364	50.00	17.49	2 dokumen	16.67
	Perubahan RKPD	Jumlah perwako perubahan RKPD yang diterbitkan	6 perwako	1,073,422,284	1 perwako	308,428,085	1 perwako	221,817,242	-	-	-	0.00	1 Perwako	16.67
	Investigasi Usulan Kegiatan Pembangunan	Jumlah usulan kegiatan prioritas kecamatan yang diinvestigasi	30 dokumen	64,720,638	5 dokumen	26,603,200	5 dokumen	7,626,725	5 dokumen	3,477,300	100.00	45.59	10 dokumen	33.33
	Intensifikasi SAKIP	Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi dalam penyusunan SAKIP	31 Perangkat Daerah	954,375,000	-	-	31 PD	214,542,000	31 PD	4,786,500	100.00	2.23	31 PD	100.00
11	Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100%	464,860,578	100%	-	100%	15,089,650	-	5,970,350	-	39.57	100%	12.50
	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA	Jumlah rapat-rapat koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA	16 kali	238,059,610	-	-	4 kali	7,804,250	2 kali	4,134,250	50.00	52.97	2 kali	12.50
	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif	Jumlah koordinasi sub bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif	16 kali	226,800,968	-	-	4 kali	7,285,400	2 kali	1,836,100	50.00	25.20	2 kali	12.50

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2018		Target Kinerja Renja Tahun 2019		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Triwulan II Tahun 2019	
									Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	10 = (8/6)	11 = (9/7)
12	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	100%	1,145,489,948	100%	208,472,521	100%	51,319,400	-	18,765,675	-	36.57	100%	16.32
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan, rapat-rapat perjalanan dinas dalam daerah luar daerah	36 kali rapat, 60 kali perjalanan dinas dalam dan luar daerah	667,408,200	6 Kali Rapat, 15 kali perjalanan dinas dalam dan luar daerah	208,472,521	6 Kali Rapat, 15 kali perjalanan dinas dalam dan luar daerah	10,809,400	4 Kali Rapat, 8 kali perjalanan dinas dalam dan luar daerah	8,536,225	66.67	78.97	10 Kali Rapat, 23 kali perjalanan dinas dalam dan luar daerah	27.78
	Tim Koordinsi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan - Jumlah Dokumen LPK2KD yang dibuat	16 kali rapat; 32 kali rapat/konsultasi luar daerah	324,081,748			4 kali	25,350,000	2 kali	5,676,500	50.00	22.39	2 kali	12.50
	koordinasi penyusunan aksi PUG	- jumlah rapat koordinasi penyusunan aksi PUG	16 kali rapat; 32 kali rapat/konsultasi luar daerah	77,000,000			4 kali	7,580,000	2 kali	4,552,950	50.00	60.07	2 kali	12.50
	Koordinasi Penyusunan Aksi SDG'S	Jumlah Rapat Koordinasi penyusunan aksi SDGS	16 kali rapat; 32 kali rapat/konsultasi luar daerah	77,000,000			4 kali	7,580,000	2 kali	-	50.00	0.00	2 kali	12.50
14	Program Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	Persentase rencana aksi PPK dengan kategori minimal baik (hijau)	100%	251,674,250	100%	64,408,660	100%	10,538,000	-	4,518,725	-	42.88	100%	37.50
	Penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) pemerintah daerah	Jumlah Pelaporan Aksi PPK	24 kali	251,674,250	4 kali	64,408,660	4 kali	10,538,000	1 kali	4,518,725	25.00	42.88	9 kali	37.50
4.04	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			2,874,236,853		-		481,338,853		19,011,800	-	3.95		
1	Program Pengembangan Inovasi Daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindak lanjuti stakeholder	75.00%	2,874,236,853	75.00%	-	80.00%	481,338,853	-	19,011,800	-	3.95	75.00%	-
	Kajian ekonomi pembangunan daerah dan kewilayahan	Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan ekonomi pembangunan daerah dan kewilayahan yang disusun	5 dokumen	981,628,500			1 dokumen	206,802,500	-	3,131,600	-	1.51	-	-
	Kajian sosial dan pemerintahan	Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan pemerintahan dan sosial budaya yang disusun	5 dokumen	895,315,000			-	185,389,000	-	2,259,600	-	1.22	-	-
	Penguatan inovasi pemerintahan layanan publik	Jumlah rekomendasi kebijakan kelitbang dan inovasi daerah	20 rekomendasi	457,227,000			3 kali	32,007,000	1 kali	1,604,200	33.33	5.01	1 kali	5.00
	Pengembangan karya inovasi dan teknologi tepat guna	Jumlah fasilitas inovasi dan teknologi tepat guna daerah	12 kali fasilitasi	540,066,353			3 kali fasilitasi	57,140,353	1 kali fasilitasi	12,016,400	33.33	21.03	1 kali fasilitasi	8.33

# **BAB III**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **DALAM PERUBAHAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2019**

#### **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

##### **1. Urusan Perencanaan**

Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Payakumbuh dengan jumlah anggaran Rp. 3.138.959.208,- dengan 14 program dan 43 kegiatan, kemudian dalam usulan Perubahan Tahun Anggaran 2019 bertambah sebesar Rp.87.064.653,- dengan jumlah program sebanyak 14 program dan 47 kegiatan dengan rincian perubahan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, berkurang sebesar Rp.24.029.430,- karena penyesuaian tarif air, listrik dan penambahan untuk daya listrik;
  - 2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional bertambah sebesar Rp. 1.345.000,- karena Penyesuaian pajak kendaraan dinas;
  - 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan, berkurang sebesar Rp. 100.307.000,- karena Efisiensi anggaran karena penyesuaian standar biaya dengan kebutuhan pembayaran honorarium pengelola keuangan dan pengurangan volume lembur;
  - 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor, bertambah sebesar Rp. 4.228.464,- karena penyesuaian gaji THL kebersihan sesuai UMP serta premi BPJS THL;
  - 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bertambah sebesar Rp. 5.986.000,- karena penambahan belanja fotocopy sesuai kebutuhan kantor;
  - 6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, bertambah sebesar Rp. 15.000.000,- karena penambahan anggaran untuk perbaikan instalasi listrik kantor Bappeda;
  - 7) Penambahan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor bertambah sebesar Rp. 55.500.000,- karena pengadaan TV, Printer dan kamera DSLR dan printer;
  - 8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah bertambah sebesar Rp.290.874.001,- dikarenakan perkiraan frekuensi pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah yang meningkat.

- 9) Penyediaan tenaga administrasi dan teknis perkantoran, bertambah Rp. 2.114.232,- karena penyesuaian gaji THL Penjaga kantor sesuai UMP serta penambahan premi BPJS.
2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 1) Penambahan kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor bertambah sebesar Rp 15.000.000 untuk pembelian karpet ruang kerja;
  - 2) Penambahan kegiatan Rehab Sedang/Berat gedung kantor bertambah sebesar Rp. 50.000.000 untuk pengadaan kanopi halaman kantor Bappeda dan perbaikan plafon ruangan kepala Bappeda;
  - 3) Penambahan kegiatan Pengadaan Mobiler bertambah sebesar Rp.25.000.000,- untuk pengadaan sofa ruang Kepala Bappeda;
  - 4) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional berkurang sebesar Rp. 29.170.800,- karena penyesuaian harga BBM dan pengurangan volume pembelian BBM untuk operasional kegiatan lain-lain.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya berkurang sebesar Rp. 900.000,- karena penyesuaian dengan jumlah pegawai Bappeda.
4. Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 1) Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD berkurang sebesar 1.082.500,- karena efisiensi anggaran makan dan minum;
  - 2) Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan publik mengalami pergeseran antar rekening kegiatan
5. Program Pengembangan data/informasi
- 1) Penyusunan informasi pembangunan daerah berkurang sebesar Rp. 46.375.000,- karena pengurangan belanja jasa konsultansi dan makan minum rapat;
  - 2) Koordinasi, rekapitulasi dan konsolidasi data teknis dan rencana kegiatan usulan DAK, berkurang sebesar Rp. 11.000.000,- karena pengurangan honorarium Non PNS.
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 1) Penyusunan rancangan RKPD berkurang Rp. 2.315.000,- karena efisiensi anggaran belanja makan minum rapat;
  - 2) Penyelenggaraan musrenbang RKPD berkurang Rp. 68.584.154,- karena Efisiensi anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
  - 3) Penetapan RKPD berkurang sebesar Rp. 100.000,- karena penyesuaian harga asesoris komputer;

- 4) Perubahan RKPD berkurang sebesar Rp. 27.950.500,- karena penyesuaian standar biaya honorarium tim penyusunan perubahan RKPD;
  - 5) Investigasi usulan kegiatan pembangunan berkurang Rp. 4.132.500,- karena efisiensi anggaran makan minum rapat.
  - 6) Keberlanjutan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah berkurang sebesar Rp. 74.359.160,- karena pengurangan honorarium, biaya akomodasi dan transportasi tenaga ahli serta kontribusi kepesertaan;
  - 7) Intensifikasi SAKIP bertambah Rp. 50.000.000,- karena penambahan anggota tim intensifikasi SAKIP Kota Payakumbuh.
7. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya  
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) berkurang Rp.11.000.000,- karena pengurangan honorarium Non PNS.
  8. Program Kerjasama Pembangunan  
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah berkurang Rp.11.000.000,- karena pengurangan honorarium Non PNS.
  9. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
    - 1) Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah berkurang sebesar Rp. 1.457.500,- karena efisiensi anggaran makan minum rapat;
    - 2) Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh berkurang Rp. 825.000,- karena efisiensi anggaran makan minum rapat
  10. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar  
Revisi RPIJM berkurang Rp. 13.395.000,- berupa pengurangan anggaran belanja jasa tenaga ahli perencanaan dan anggaran penjiwaan

## **2. Urusan Penelitian dan Pengembangan**

Urusan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan Bappeda tahun 2019 dengan jumlah anggaran Rp. 481.338.853,- dengan 1 program dan 4 kegiatan. Usulan dalam perubahan tahun 2018 menjadi Rp. 409.274.200,- atau bertambah sebesar Rp. 72.064.653,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Inovasi Daerah
  - 1) Kajian ekonomi pembangunan daerah dan kewilayahan berkurang sebesar Rp. 61.416.000,- karena Pengurangan anggaran transportasi & akomodasi serta uang saku peserta sosialisasi dan efisiensi anggaran perjalanan dinas tim DRD;

- 2) Kajian sosial dan pemerintahan berkurang sebesar Rp. 6.196.000,- karena karena Pengurangan anggaran transportasi & akomodasi serta uang saku peserta sosialisasi.;
- 3) Penguatan inovasi pemerintahan layanan publik bertambah sebesar Rp.32.322.000,- karena penambahan honorarium serta biaya transportasi dan akomodasi narasumber pusat;
- 4) Pengembangan karya inovasi dan teknologi tepat guna berkurang sebesar Rp.36.774.653,- karena efisiensi belanja dekorasi, sewa stan pameran TTG dan pengurangan honorarium narasumber inovator dan posyantek.

Tabel 3.1  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Indikator Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019					Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00.02.	PERENCANAAN				3,138,959,208	3,226,023,861	87,064,653			2,809,184,970	
0.00.4.00.4.00.02.01.0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM		81.00	1,465,057,272	1,715,768,539	250,711,267		83.00	1,373,521,421	
0.00.4.00.4.00.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh	Benda pos 300 lembar, cek giro 10 buku, paket pengiriman 15 Kr	2,387,000	2,387,000	-	APBD	Benda pos 300 lembar, cek giro 10 buku, paket pengiriman 15 Kr	2,387,000	Sedang berjalan
0.00.4.00.4.00.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik, telpon yang dibayarkan	Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh	4 rekening, 12 bulan	99,999,996	75,970,566	(24,029,430)	APBD	4 rekening, 12 bulan	79,500,000	Sedang berjalan
0.00.4.00.4.00.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh	24 unit	5,375,000	6,720,000	1,345,000	APBD	24 unit	6,875,000	Sedang berjalan
0.00.4.00.4.00.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh	34 orang	462,571,000	362,264,000	(100,307,000)	APBD	34 orang	362,571,000	Sedang berjalan
0.00.4.00.4.00.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli, jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayar	Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh	17 jenis, 2 orang	58,608,336	62,836,800	4,228,464	APBD	17 jenis, 2 orang	62,751,141	Sedang berjalan
0.00.4.00.4.00.02.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh	56 unit	18,011,000	18,011,000	-	APBD	56 unit	14,702,750	Sedang berjalan
0.00.4.00.4.00.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh	59 jenis	30,360,896	30,360,896	-	APBD	59 jenis	30,326,100	Sedang berjalan
0.00.4.00.4.00.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh	8 jenis, 50.000 lembar, 200 buku	19,807,872	25,793,872	5,986,000	APBD	8 jenis, 50.000 lembar, 200 buku	19,713,990	Sedang berjalan
0.00.4.00.4.00.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh	2 jenis	5,600,000	20,600,000	15,000,000	APBD	2 jenis	5,554,500	Sedang berjalan
0.00.4.00.4.00.02.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diadakan	Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh	6 unit	-	55,500,000	55,500,000	APBD	-	-	Baru
0.00.4.00.4.00.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh	3.600 eksemplar: 48 buku	21,120,000	21,120,000	-	APBD	3.600 eksemplar: 48 buku	20,493,000	Sedang berjalan

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Indikator Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019					Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.4.00.4.00.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan; dan minuman/snack yang disediakan	Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh	574 porsi, 967 porsi, 63 galon	15,931,000	15,931,000	-	APBD	574 porsi, 967 porsi, 63 galon	15,931,000	Sedang berjalan
0.00.4.00.4.00.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh	48 kali, 25 kali	698,956,200	989,830,201	290,874,001	APBD	40 kali, 25 kali	696,802,000	Sedang berjalan
0.00.4.00.4.00.02.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga adm/teknik perkantoran yang dibayarkan	Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh	1 orang	26,328,972	28,443,204	2,114,232	APBD	2 orang	55,913,940	Sedang berjalan
<b>0.00.4.00.4.00.02.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik</b>		<b>80%</b>	<b>158,818,340</b>	<b>219,647,540</b>	<b>60,829,200</b>	APBD	<b>80%</b>	<b>128,813,735</b>	
0.00.4.00.4.00.02.01.02.05	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh	1 set	-	15,000,000	15,000,000	APBD	-	-	Baru
0.00.4.00.4.00.02.01.02.23	Pengadaan Mobiler	Jumlah mobiler yang diadakan	Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh	1 set	-	25,000,000	25,000,000	APBD	-	-	Baru
0.00.4.00.4.00.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh	21 kendaraanroda dua; 4 unit krndaraan roda empat	158,818,340	129,647,540	(29,170,800)	APBD	21 kendaraanroda dua; 4 unit krndaraan roda empat	128813735	Sedang berjalan
0.00.4.00.4.00.02.01.02.22	Rehab Sedang/Berat gedung kantor	Jumlah jenis rehab yang dilaksanakan	Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh	1 jenis	-	50,000,000	50,000,000	APBD	-	-	Baru
<b>0.00.4.00.4.00.02.01.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap</b>		<b>100%</b>	<b>18,900,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>(900,000)</b>	APBD	<b>100%</b>	<b>18,900,000</b>	
0.00.4.00.4.00.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh	40 stel	18,900,000	18,000,000	(900,000)	APBD	40 stel	18,900,000	Sedang berjalan
0.00.4.00.4.00.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek		<b>3 orang</b>	<b>26,840,724</b>	<b>26,840,724</b>	-	APBD	-	-	
0.00.4.00.4.00.02.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang dikirim untuk mengikuti bimbingan teknis	Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh	3 orang	26,840,724	26,840,724	-	APBD	-	-	Sedang berjalan
4.00.06.4.00.02.01.15.	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat		<b>A</b>	<b>13,500,000</b>	<b>12,417,500</b>	<b>(1,082,500)</b>	APBD	<b>A</b>	<b>9,563,025</b>	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Indikator Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019					Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00.06.4.00.0 2.01.15.	Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan SKPD yang disusun	Bappeda Kota Payakumbuh	6 Laporan	6,820,000	5,737,500	(1,082,500)	APBD	-	-	Sedang berjalan
4.00.06.4.00.0 2.01.15.1	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan publik	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan publik yang disusun	Bappeda Kota Payakumbuh	4 Dokumen	6,680,000	6,680,000	-	APBD	4 Dokumen	9,563,025	Sedang berjalan
<b>4.00.06.4.00.0 2.01.15.</b>	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>Persentase ketersediaan data /informasi perencanaan pembangunan daerah</b>		<b>80,00%</b>	<b>144,812,010</b>	<b>87,437,010</b>	<b>(57,375,000)</b>	APBD	<b>85%</b>	<b>88,811,850</b>	
4.00.06.4.00.0 2.01.15.	Penyusunan informasi pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang disusun	Perangkat Daerah se-Kota Payakumbuh	2 dokumen	53,521,700	7,146,700	(46,375,000)	APBD	2 dokumen	8,521,620	Sedang berjalan
4.00.06.4.00.0 2.01.15.1	Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)	Jumlah dokumen indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Payakumbuh	Perangkat Daerah se-Kota Payakumbuh	1 dokumen	75,394,450	75,394,450	-	APBD	1 dokumen	75,394,380	Sedang berjalan
4.00.02.4.00.0 2.01.16.2	Koordinasi, rekapitulasi dan konsolidasi data teknis dan rencana kegiatan usulan DAK	Usulan Bidang DAK yang diusulkan	Perangkat Daerah se-Kota Payakumbuh	10 bidang	15,895,860	4,895,860	(11,000,000)	APBD	10 bidang	4,895,850	Sedang berjalan
<b>4.00.02.4.00.0 2.01.15.</b>	<b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Persentase faskel yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik</b>		<b>85.11%</b>	<b>78,377,010</b>	<b>78,377,010</b>	<b>-</b>	APBD	<b>89.36%</b>	<b>106,577,005</b>	
4.00.02.4.00.0 2.01.15.	Peningkatan kapasitas tenaga fasilitator perencana	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Faskel se-Kota Payakumbuh	47 orang	78,377,010	78,377,010	-	APBD	47 orang	106,577,005	Sedang berjalan
<b>4.00.02.4.00.0 2.01.16.</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Persentase Usulan masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah</b>		<b>55.00%</b>	<b>1,084,043,952</b>	<b>956,603,138</b>	<b>(127,440,814)</b>	APBD	<b>60.00%</b>	<b>961,968,589</b>	
		<b>Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD</b>		<b>95.24%</b>				APBD	<b>97.00%</b>		
		<b>Persentase Perangkat Daerah yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90 %</b>		<b>100.00%</b>				APBD	<b>100.00%</b>		

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Indikator Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019					Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00.02.4.00.0 2.01.16.0	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah draf dokumen rancangan awal RKPD yang disusun	Perangkat Daerah se-Kota Payakumbuh	1 dok	254,837,000	252,522,000	(2,315,000)	APBD	1 dok	317,697,140	Sedang berjalan
4.00.02.4.00.0 2.01.16.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Forum SKPD dan Musrenbang RKPD	Stakeholder se- Kota Payakumbuh	2 hari	135,143,615	66,559,461	(68,584,154)	APBD	2 hari	82,201,030	Sedang berjalan
4.00.02.4.00.0 2.01.16.1	Penetapan RKPD	Jumlah perwako RKPD yang diterbitkan	Perangkat Daerah se-Kota Payakumbuh	1 Perwako	29,202,320	29,102,320	(100,000)	APBD	1 Perwako	29,202,250	Sedang berjalan
4.00.02.4.00.0 2.01.16.	Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen evaluasi, pengendalian, pelaporan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Perangkat Daerah se-Kota Payakumbuh	3 dok	10,552,400	10,552,400	-	APBD	3 dok	20,552,185	Sedang berjalan
4.00.02.4.00.0 2.01.16.	Perubahan RKPD	Jumlah Perwako Perubahan RKPD yang diterbitkan	Perangkat Daerah se-Kota Payakumbuh	1 perwako	221,817,242	193,867,242	(27,950,000)	APBD	1 perwako	189,067,160	Sedang berjalan
4.00.02.4.00.0 2.01.16.2	Investigasi usulan kegiatan pembangunan	Jumlah usulan kegiatan prioritas kecamatan yang diinvestigasi	Kecamatan se-Kota Payakumbuh	5 dokumen	7,626,725	3,494,225	(4,132,500)	APBD	-	-	Sedang berjalan
4.00.02.4.00.0 2.01.16.	Keberlanjutan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang diproses melalui SIPPD	Perangkat Daerah se-Kota Payakumbuh	2 dokumen	210,322,650	135,963,490	(74,359,160)	APBD	2 dokumen	143,603,914	Sedang berjalan
4.00.02.4.00.0 2.01.16.	Intensifikasi SAKIP	Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi dalam penyusunan SAKIP	Perangkat Daerah se-Kota Payakumbuh	31 Perangkat Daerah	214,542,000	264,542,000	50,000,000	APBD	31 Perangkat Daerah	179,644,910	Sedang berjalan
<b>4.00.02.4.00.0 2.01.17.</b>	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	<b>Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras</b>		<b>100%</b>	<b>15,089,650</b>	<b>15,089,650</b>	-	APBD	<b>100%</b>	<b>15,089,450</b>	
4.00.02.4.00.0 2.01.17.0	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA	jumlah rapat-rapat koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA	Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi	4 kali	7,804,250	7,804,250	-	APBD	4 kali	7,804,180	Sedang berjalan
4.00.02.4.00.0 2.01.17.1	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif	Jumlah koordinasi sub bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif	Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi	4 kali	7,285,400	7,285,400	-	APBD	4 kali	7,285,270	Sedang berjalan

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Indikator Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019					Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00.02.4.00.0 2.01.18.	Program perencanaan sosial budaya	Persentase PD lingkup bidang sosial & budaya yg telah memiliki doku-men perencanaan yg baik, konsisten & selaras		100%	51,319,400	40,319,400	(11,000,000)	APBD	100%	37,739,200	
4.00.02.4.00.0 2.01.35.03.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan, rapat-rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Perangkat Daerah lingkup bidang sosial budaya	6 Kali Rapat, 15 kali perjalanan dinas dalam dan luar daerah	10,809,400	10,809,400	-	APBD	6 Kali Rapat, 15 kali perjalanan dinas dalam dan luar daerah	18,389,370	Sedang berjalan
4.00.02.4.00.0 2.01.35.05.	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, jumlah dokumen profil program penanggulangan kemiskinan yang disusun, jumlah dokumen LP2KD yang disusun, jumlah dokumen suseda yang disusun dan jumlah FKP-PBDT yang dilaksanakan	Perangkat daerah terkait penanggulangan kemiskinan	4 kali rapat; 8 kali rapat/konsultasi luar daerah	25,350,000	14,350,000	(11,000,000)	APBD	4 kali rapat; 8 kali rapat/konsultasi luar daerah	14,349,830	Sedang berjalan
4.00.02.4.00.0 2.01.35.06	koordinasi penyusunan aksi PUG	- jumlah rapat koordinasi penyusunan aksi PUG	Perangkat Daerah se-Kota Payakumbuh	16 kali rapat; 32 kali rapat/konsultasi luar daerah	7,580,000	7,580,000	-	APBD	-	-	Sedang berjalan
4.00.02.4.00.0 2.01.35.07.	Koordinasi Penyusunan Aksi SDG'S	Jumlah Rapat Koordinasi penyusunan aksi SDGS	Perangkat Daerah se-Kota Payakumbuh	16 kali rapat; 32 kali rapat/konsultasi luar daerah	7,580,000	7,580,000	-	APBD	16 kali rapat; 32 kali rapat/konsultasi luar daerah	5,000,000	Sedang berjalan
4.00.02.4.00.0 2.01.21.	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti		90%	19,128,000	8,128,000	(11,000,000)	APBD	90%	8,128,080	
4.00.02.4.00.0 2.01.21.	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	- Jumlah rapat koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah yang dilaksanakan - Jumlah MOU yang dibuat	Pemerintah daerah, pihak ketiga (swasta, ormas, lembaga non pemerintah), Lembaga/Pemda di luar negeri	- 4 kali - 3 MOU	19,128,000	8,128,000	(11,000,000)	APBD	- 4 kali - 3 MOU	8,128,080	Sedang berjalan
4.00.02.4.00.0 2.01.24.	Program penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	Persentase rencana aksi PPK dengan kategori minimal baik (hijau)		100%	10,538,000	10,538,000	-	APBD	100%	10,537,980	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Indikator Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019					Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00.02.4.00.0 2.01.24.	Penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaporan Aksi PPK	Perangkat Daerah se-Kota Payakumbuh	4 kali	10,538,000	10,538,000	-	APBD	4 kali	10,537,980	Sedang berjalan
<b>4.00.02.4.00.0 2.01.30.</b>	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh</b>	<b>Persentase PD bidang IPW yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras</b>		<b>100%</b>	<b>11,762,725</b>	<b>9,480,225</b>	<b>(2,282,500)</b>	APBD	<b>100%</b>	<b>14,762,625</b>	
4.00.02.4.00.0 2.01.16.	Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Jumlah rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah tingkat kota, propinsi dan pusat	Perangkat Daerah lingkup bidang IPW	8 SKPD, 4 kali, 5 kali, 2 kali, 100%	5,560,250	4,102,750	(1,457,500)	APBD	8 SKPD, 4 kali, 5 kali, 2 kali, 100%	6,202,475	Sedang berjalan
4.00.02.4.00.0 2.01.30.0	Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh tingkat kota, propinsi dan pusat	Perangkat Daerah lingkup bidang IPW	5 kali	6,202,475	5,377,475	(825,000)	APBD	5 kali	8,560,150	Sedang berjalan
<b>4.00.02.4.00.0 2.01.33.</b>	<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar</b>	<b>Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar yang ditindaklanjuti</b>		<b>100%</b>	<b>40,772,125</b>	<b>27,377,125</b>	<b>(13,395,000)</b>	APBD	<b>100%</b>	<b>34,772,010</b>	
4.00.02.4.00.0 2.01.33.	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah rapat-rapat koordinasi pengentasan masalah air minum dan sanitasi tingkat kota (12 SKPD, 4 kali rapat), propinsi dan pusat	Perangkat Daerah lingkup bidang IPW	12 SKPD, 5 kali	15,438,875	15,438,875	-	APBD	12 SKPD, 5 kali	15,438,800	Sedang berjalan
4.00.02.4.00.0 2.01.33.1	Koordinasi penataan dan pencegahan kawasan kumuh	Jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi Penataan, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh tingkat kota, propinsi dan pusat	Perangkat Daerah lingkup bidang IPW	12 SKPD, 6 kali	5,671,500	5,671,500	-	APBD	12 SKPD, 6 kali	5,671,460	Sedang berjalan
4.00.02.4.00.0 2.01.33.1	Revisi RPIJM	Jumlah rapat koordinasi revisi RPIJM	Perangkat Daerah se-Kota Payakumbuh	4 kali	19,661,750	6,266,750	(13,395,000)	APBD	4 kali	13,661,750	Sedang berjalan
<b>4.00.06.</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>481,338,853</b>	<b>409,274,200</b>	<b>(72,064,653)</b>	APBD		<b>370,338,230</b>	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Indikator Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019					Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00.02.4.00.0 2.01.29.	Program pengembangan inovasi daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindak lanjuti stakeholder		80.00%	481,338,853	409,274,200	(72,064,653)	APBD	85.00%	370,338,230	
4.00.02.4.00.0 2.01.29.01	Kajian ekonomi pembangunan daerah dan kewilayahan	jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan ekonomi pembangunan daerah dan kewilayahan yang disusun	Perangkat Daerah; Lembaga/Organisasi Masyarakat; Perguruan Tinggi; BUMN/BUMN; Perbangkan	1 dokumen	206,802,500	145,386,500	(61,416,000)	APBD	1 dokumen	110,802,400	Sedang berjalan
4.00.02.4.00.0 2.01.29.02	Kajian sosial dan pemerintahan	Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan pemerintahan dan sosial budaya yang disusun	Perangkat Daerah; Lembaga/Organisasi Masyarakat; Perguruan Tinggi; BUMN/BUMN; Perbangkan	2 dokumen	185,389,000	179,193,000	(6,196,000)	APBD	2 dokumen	85,388,780	Sedang berjalan
4.00.02.4.00.0 2.01.29.03	Penguatan inovasi pemerintahan layanan publik	Jumlah rekomendasi kebijakan kelitbangan dan inovasi daerah	Perangkat Daerah; Lembaga/Organisasi Masyarakat; Perguruan Tinggi; BUMN/BUMN; Perbangkan	3 kali	32,007,000	64,329,000	32,322,000	APBD	3 kali	57,006,970	Sedang berjalan
4.00.02.4.00.0 2.01.29.04	Pengembangan karya inovasi dan teknologi tepat guna	Jumlah fasilitas inovasi dan teknologi tepat guna daerah	Perangkat Daerah; Lembaga/Organisasi Masyarakat; Perguruan Tinggi; BUMN/BUMN; Perbangkan	3 kali fasilitasi	57,140,353	20,365,700	(36,774,653)	APBD	3 kali fasilitasi	117,140,080	Sedang berjalan
<b>TOTAL</b>					<b>3,620,298,061</b>	<b>3,635,298,061</b>	<b>15,000,000</b>			<b>3,179,523,200</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2019 merupakan tindaklanjut dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh No. 59 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2019.

Perubahan Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2019 disusun berdasarkan pada Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dan hasil pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2019, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Bappeda Kota Payakumbuh yaitu "Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Terintegrasi, Inovatif Dan Berkelanjutan" dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kota Payakumbuh dengan lebih efektif dan efisien.

Perubahan Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan program dan kegiatan Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2019.

**KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH**



**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2019**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif;	Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	33,00%
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	95,24%
3	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan	Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	89,44%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat	A
5	Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	80,00%

Payakumbuh, Desember 2018  
**KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH**



**Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si**  
NIP. 19751005 199501 1 001